

# Bab 1

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

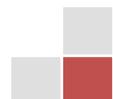
Terselenggaranya Goodgovernance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagaimana dimaklumi untuk mencapai Program Pembangunan Daerah yang merupakan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya pengelolaan di bidang pendidikan, dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan taraf hidup masyarakat, sehingga berdampak terhadap capaian IPM di Kota Batam.

Keberadaan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dalam rangka mewujudkan misi keempat Pemerintah Kota Batam, yakni Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ yang didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Menjawab tanggung jawab yang diberikan, maka Dinas Pendidikan Kota Batam telah menetapkan 3 (tiga) Kebijakan Umum dan Anggaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam, yakni :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah;



3. Memberikan Bantuan Pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumber daya masyarakat;

Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam disiasati dengan membebaskan sebagian pembangunan melalui APBN Bidang Pendidikan yang dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

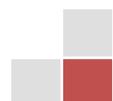
### **1. Tugas Pokok**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai Tugas dan Fungsinya

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi SKPD antara lain :

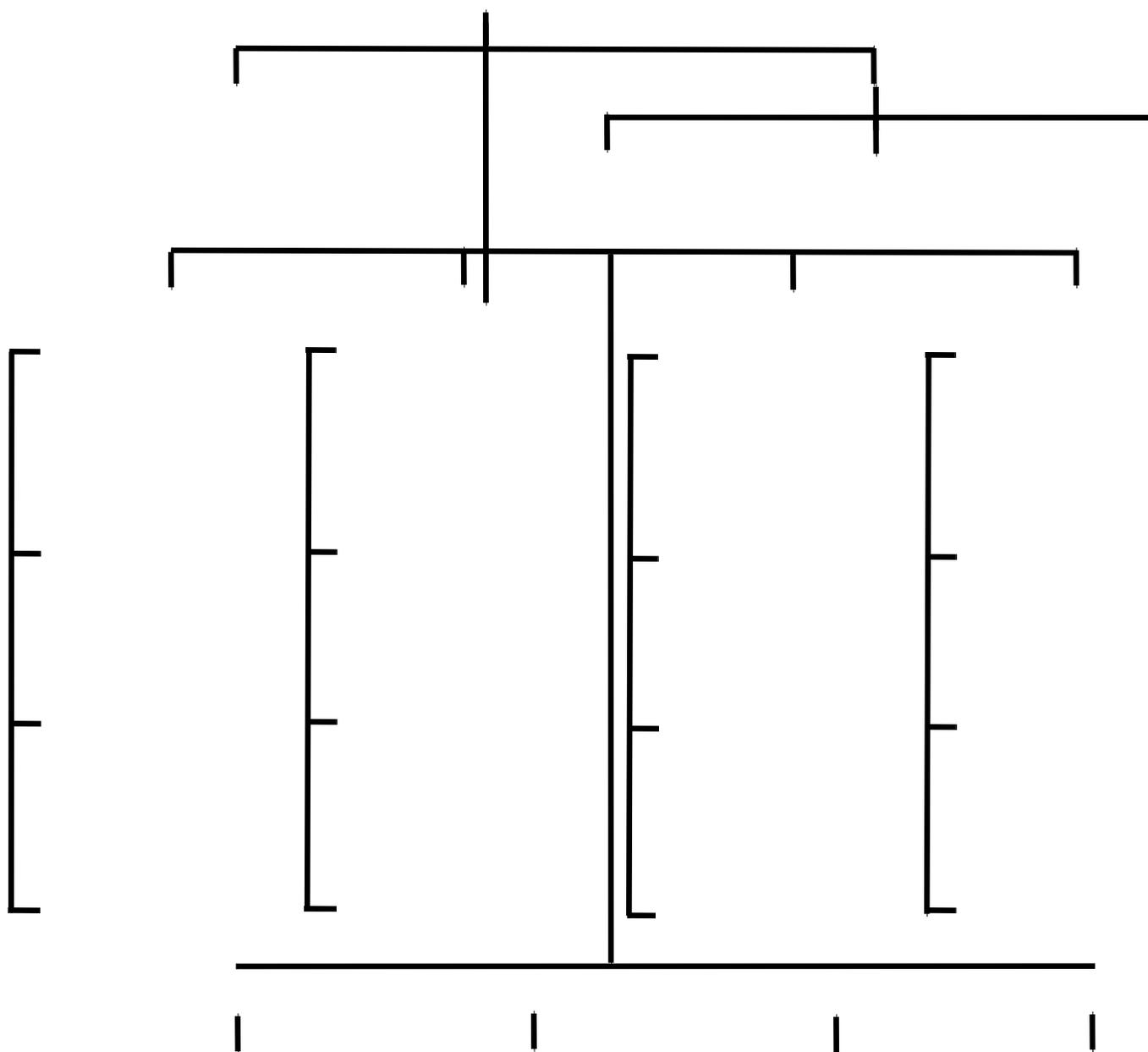
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan pembinaan ketenagaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan pembinaan ketenagaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan pembinaan ketenagaan; dan



d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Pelaksanaan tugas sesuai dengan struktur yang ada masih dipandang kurang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh penjuru Kota Batam khususnya masyarakat yang berada di daerah Hinterland. Sehingga pada akhirnya dilakukan penambahan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Daerah yang secara garis lurus berada dibawah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibagi dalam beberapa unit, yang terdiri antara lain :

1. Unit Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Galang
2. Unit Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Bulang
3. Unit Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Belakang Padang

Selain ketiga unit tersebut, Dinas Pendidikan Kota Batam juga menaungi sekolah-sekolah yang berada di Kota Batam. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jumlah sekolah di Dinas Pendidikan adalah sebagaimana dijelaskan pada tabulasi berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Sekolah di Kota Batam**

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Berdasarkan Status Sekolah	
		Negeri	Swasta
1.	Taman Kanak-Kanak/RA	19/0	363/122
2.	Sekolah Dasar/MI	145/2	208/33
3.	Sekolah Menengah Pertama/MTs	59/2	105/18

*Sumber Data : Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa*

Jumlah Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Batam (tidak termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar) sampai dengan bulan desember 2018 sebanyak : 92 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada: Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP, Bidang Pembinaan Ketenagaan serta 3 UPT cabang Dinas (Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan).



**Tabel 1.2**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Non PNS**

No.	Uraian	Jumlah	
		PNS	NON PNS
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	8	-
3.	Golongan III	31	-
4.	Golongan IV	14	-
5.	Non PNS	-	39
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>	<b>39</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>92</b>	

**Tabel 1.3.**  
**Tingkat Pendidikan Pejabat Eselon Dinas Pendidikan Kota Batam**

NO	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JML
		SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3	
<b>I</b>	<b>STRUKTURAL</b>								
	a. Eselon II	-	-	-	-	1	-	-	1
	b. Eselon III	-	-	-	-	2	2	1	5
	c. Eselon IV	-	-	-	-	8	7	-	15
	<b>JUMLAH</b>	-	-	-	-	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>21</b>



Tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam berjumlah 10.210 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya sebanyak 69.74% dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) non PNS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

**Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan							Total
		<=SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	TK	0	500	16	37	1.209	11	1	1.774
2	SD	400	17	92	152	5.872	143	0	6.676
3	SMP	102	7	8	48	1.521	73	1	1.760
	<b>Total</b>	<b>539</b>	<b>525</b>	<b>118</b>	<b>289</b>	<b>10.708</b>	<b>339</b>	<b>2</b>	<b>10.210</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

Tabel:1.5

**Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian**

No	Jenjang	Status PNS dan NON PNS		Total
		PNS	NON PNS	
1	TK	33	91	124
2	SD	1300	1455	2755
3	SMP	703	568	1271
	<b>Total</b>	<b>2036</b>	<b>2114</b>	<b>4150</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam



## 1. Keadaan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Setiap Satuan Pendidikan**

Usia	Jumlah	Satuan Pendidikan	Jumlah
Usia 4-6 Tahun	69.995	TK/PAUD/RA	54.405
Usia 7-12 Tahun	132.462	SD/MI	138.576
Usia 13-15 Tahun	51.018	SMP/MTs	55.598

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

## 2. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

**Tabel 1.7**  
**Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas**

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Ruang Kelas			
		Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sdg/Brk
TK/PAUD	382	1360	1327	33	0
SD	353	3758	1968	1722	68
MI	35	228	160	58	10
SMP	162	1380	738	625	17
MTs	20	128	90	31	7



<b>JUMLAH</b>	<b>952</b>	<b>6.674</b>	<b>4.283</b>	<b>2.469</b>	<b>102</b>
---------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

Pembangunan pendidikan menuju Pendidikan Indonesia 2018 direncanakan tidak ada lagi penduduk yang tidak bersekolah di tingkat pendidikan dasar, dengan demikian akan terwujud derajat pendidikan masyarakat yang optimal, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai dengan penduduknya hidup dalam lingkungan yang kondusif dan dengan perilaku yang rasional dalam kehidupan sosial, serta memiliki kemampuan berperilaku positif, adil dan merata serta memiliki derajat pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan bidang pendidikan diperlukan perencanaan yang baik agar arah pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan fokus sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

## D. VISI DAN MISI

### 1. Pernyataan Visi Dinas Pendidikan Kota Batam

Visi Pembangunan Pendidikan Kota Batam melalui Perencanaan Strategi 2016 - 2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA,  
BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”**

### 2. Pernyataan Misi

Dalam upaya pencapaian visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk dokumen RPJMD, maka selanjutnya Dinas Pendidikan membuat dokumen Renstra dengan mencantumkan visi yang memiliki benang merah dari visi dan misi kepala daerah. Setelah visi tersebut ditetapkan selanjutnya disusun misi untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan tersebut.

Misi Dinas Pendidikan Kota Batam terdiri dari :

- a. Mencerdaskan Sumber Daya Manusia yang kreatif , inovatif , dan Kompetitif;



- b. Meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang bermutu dan merata;
- c. Meningkatkan Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang berintegritas;
- d. Meningkatkan Kesetaraan layanan pendidikan dalam keterlibatan pelaku pendidikan;
- e. Mewujudkan penguatan tata kelola yang dinamis, kreatif ,inovatif dan Akuntabel;



## *Bab 2*

# *Perencanaan dan Perjanjian Kinerja*

### **A. PERENCANAAN**

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi OPD yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Batam, maka perlu disusun suatu rencana kerja dan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan strategi organisasi yang tepat. Indikator Kinerja Utama disusun dan ditetapkan oleh Kepala OPD untuk selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan tingkat keberhasilan OPD menjalankan rencana kerja guna mencapai dan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Salah satu permasalahan Pendidikan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Batam adalah pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, mutu dan relevansi, dan manajemen pendidikan khususnya pendidikan Dasar. Penekanan akan pentingnya pembangunan pendidikan, dibutuhkan karena semua pihak meyakini bahwa pembangunan di masa mendatang disamping tetap bertumpu pada pembangunan ekonomi, akan bertumpu pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam Pola dasar Pembangunan Kota Batam, ditegaskan bahwa titik berat pembangunan bidang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga masyarakat atau stakeholder pendidikan.



## 1. Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Batam menetapkan suatu indikator kinerja utama yang menjadi pedoman dalam menentukan keberhasilan suatu SKPD :

Tabel 2.1.  
Indikator Kinerja Utama

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD
2	Mutu Layanan Pendidikan	Persentase sekolah PAUD berakreditasi minimal B
		Persentase SD berakreditasi minimal B
		Persentase SMP berakreditasi minimal B
3	Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisen
4	Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan	Tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat

## B. Rencana Strategis (RENSTRA)

Sesuai dengan dokumen RPJMD, maka tujuan yang ingin diwujudkan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah **Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa.** Tujuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan**

NO	TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	T1	Kualitas Pendidikan	Peringkat Hasil Ujian Sekolah SD Se Provinsi Kepulauan Riau						1
			Peringkat Hasil Ujian Nasional SMP Se Provinsi Kepulauan Riau						1
	S.1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	73	75	76	77	78	79
	S.2	Mutu Layanan Pendidikan	Persentase sekolah berakreditasi minimal B						
			PAUD	36,46	41,35	42	43	44	45
			SD	53,58	56	61	64	67	70
			SMP	64,59	67	69	71	74	78
	S.3	Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisen	100	100	100	100	100	100
	S.4	Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan	Tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100



### **C. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan di capai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan di wujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan di wujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelola nya. Manfaat dari perjanjian kinerja bagi pimpinan instansi adalah memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Tahun 2018 terdapat 4 sasaran strategis yang akan di wujudkan dinas pendidikan kota batam. Target yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan di wujudkan melalui berbagai program dan kegiatan dinas pendidikan kota batam tahun 2018.

Berikut adalah perjanjian kinerja dinas pendidikan kota batam:





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRI ARULAN**

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak **pertama**.

Nama : **MUHAMMAD RUDI**

Jabatan : Walikota Batam

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak **kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
**WALIKOTA BATAM**  
**PENDIDIKAN**

Batam, Januari 2019  
Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS**  
**KOTA BATAM**



**MUHAMMAD RUDI****HENDRI ARULAN****Pembina Tk. I**

NIP. 19670719 199103 1 009

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**

<b>N O</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	77
2	Mutu Layanan Pendidikan	Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B :  PAUD  SD  SMP	  43,00  64,00  71,00
3	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien	100
4	Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan	Tersedianya bantuan pendidikan yang efektif kepada masyarakat	100

Program:

Anggaran:

Kegiatan:

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 217.505.556.276,00 70 Kegiatan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.374.569.640,00 1 Kegiatan
3. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Rp 78.610.888.406,32 20 Kegiatan
4. Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Rp 2.109.440.400,00 4 Kegiatan
5. Peningkatan Mutu dan

*Dinas Pendidikan Kota Batam | | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Tahun 2018)*

Manajemen Pelayanan Kependidikan	Rp 2.309.437.000,00	5 Kegiatan
-------------------------------------	---------------------	------------

Program:	Anggaran:	Kegiatan:
----------	-----------	-----------

6. Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif	Rp 4.305.000.000,00	1 Kegiatan
<b>Total</b>	<b>Rp. 306.214.891.722,32</b>	<b>101 Kegiatan</b>

Pihak Kedua,  
WALIKOTA BATAM

Batam, Januari 2019  
Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BATAM

**MUHAMMAD RUDI**

**HENDRI ARULAN**  
**Pembina Tk. I**  
NIP. 19670719 199103 1 009

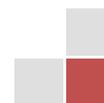


## ***Bab 3***

### ***Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan***

Penetapan kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja disemua jenjang pada Dinas Pendidikan, telah ditetapkan target kinerja yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan Khususnya pada tahun 2018. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja diperlukan suatu informasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan tersebut. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atau atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2018. Akuntabilitas kinerja dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data dan analisisnya, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja, pertanggung jawaban dimaksudkan dalam rangka transparansi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus dijadikan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan perencanaan dengan pelaksanaan melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintahan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang dibuat sesuai ketentuan yang



diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2018, Dinas Pendidikan Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010



Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disusun dan disajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan capaian kinerja yang telah ditetapkan

#### **A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN**

Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, apabila masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau efisien. Karena itu kualitas pelayanan sangat penting dan seharusnya selalu fokus pada kepuasan pelanggan. Bagi instansi pemerintahan khususnya Dinas Pendidikan sebagai instansi yang memberikan pelayanan pada layanan pendidikan harus memiliki ukuran keberhasilan menjalankan program dan kegiatan dalam bentuk Kinerja. Kinerja menunjukkan ukuran yang dijadikan dasar untuk mengukur dan menilai sejauh mana program dan kegiatan dapat terealisasi dalam periode kerja yang ditargetkan. Indikator kinerja program menyangkut hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan sementara indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait langsung dengan indikator program. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai tentu dapat diukur dengan capaian tahun sebelumnya berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan, target dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi landasan bagi semua pelaksana program dan kegiatan untuk tetap fokus dan konsisten dalam komitmen yang dibangun untuk tercapainya kinerja yang maksimal. Berdasarkan renstra dan renja dinas Pendidikan telah ditetapkan indikator kinerja Utama (IKU) antara lain:

1. Persentase APK PAUD
2. Persentase APK SD
3. Persentase APM SD
4. Persentase APK SMP
5. Persentase TK Berakreditasi B
6. Persentase SD Berakreditasi Minimal B
7. Persentase SMP Berakreditasi Minimal B
8. Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien



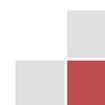
9. Persentase tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat
10. Meningkatnya peran serta masyarakat

Capaian kinerja Dinas Pendidikan di tahun 2018 merupakan pelaksanaan program dan kegiatan ditahun 2018 yang telah dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran selama satu tahun. Mengingat ditahun 2016 terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Peralihan Rencana Strategis dari Tahun 2011-2016 ke Rencana strategis 2016-2021, maka telah dilakukan review terhadap indikator kinerja serta sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan Renstra dan Renja dinas pendidikan terdapat satu tujuan yang hendak dicapai. Dalam pencapaian tujuan telah ditetapkan 4 sasaran. Dari hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018 capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan

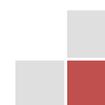
TUJUAN DAN SASARAN			INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	
T1	Kualitas Pendidikan		Peringkat Hasil Ujian Sekolah SD Se Provinsi Kepulauan Riau	1	1	
			Peringkat Ujian Nasional SMP Se Provinsi Kepulauan Riau	1	1	
	S1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini		APK PAUD	76	77
		S.1.1	Meningkatkan Minat Orang tua untuk mendaftarkan anak ke lembaga PAUD	Meningkatnya Persentase anak yang mendaftarkan ke lembaga PAUD	19,06	19,59
			S.1.1.1 Sosialisasi Pendidikan PAUD melalui Pembinaan pendidikan anak usia dini terintegrasi	Terlaksananya sosialisasi minat orang tua mendaftarkan anak ke lembaga PAUD (12 Kecamatan)	100	100
		S.1.2	Ketersediaan Sarana Pendidikan PAUD	Jumlah peningkatan daya tampung TK pada satuan pendidikan negeri	1164	1164
			S.1.2.1 Terbangunnya GSB TK	Jumlah GSB TKN yang dibangun	0	0
			S.1.2.1 Terbangunnya RKB TK	Jumlah RKB TKN yang dibangun	0	0



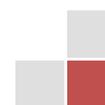
S 2	Mutu Layanan Pendidikan		Persentase sekolah berakreditasi minimal B		
			PAUD	42	41,62
			SD	61	62,89
			SMP	69	69,80
	S.2.1	Pembinaan dan Pengembangan PAUD	Jumlah lembaga PAUD	530	382
	S.2.1.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum PAUD	Persentase guru yang mengikuti pelatihan K 13	83,00	83,02
	S.2.1.2	Kondisi layak guna Sarana dan prasarana PAUD	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	77,00	78,00
	S.2.1.3	Peningkatan kecakapan motorik peserta didik PAUD	Persentase peserta didik yang mengikuti kegiatan kreasi anak PAUD	87,00	87,00
	S.2.1.4	Bangunan PAUD yang laik guna	Sekolah PAUD Bangunan Kondisi Baik	97,98	95,55
	S.2.2	Peningkatan status rapor mutu SD	Jumlah sekolah menuju kategori minimal SNP 3	286	291
	S.2.2.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum SD	Persentase guru yang mengikuti pelatihan K 13	68,50	68,80
			Pelaksanaan ujian sekolah SD	ada	ada
S.2.2.2	Peningkatan kualitas lulusan SD	Rata-rata nilai Ujian Sekolah SD	70,00	70,50	
		Angka Putus Sekolah SD	0,019	0,05	



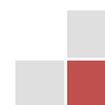
	S.2.2.3	Bangunan SD laik guna	Sekolah pendidikan SD bangunan kondisi baik	93,79	91,22
	S.2.2.4	Kondisi laik guna Sarana dan prasarana SD	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	70,00	72,00
	S.2.2.5	Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik Siswa SD	Jumlah perolehan prestasi akedemik minimal tingkat provinsi	3	3
			Jumlah perolehan prestasi non akedemik minimal tingkat provinsi (dari 28 nomor lomba)	24	24
S.2.3	Perluasan Akses Pendidikan Dasar SD		APK SD/MI/Paket A	104,50	104,62
			APM SD/MI/Paket A	94	95,87
	S.2.3.1	Terbangunnya GSB SD	Jumlah GSB SDN yang dibangun	0	0
	S.2.3.2	Terbangunnya RKB SD	Jumlah RKB SDN yang dibangun	50	54
S.2.4	Peningkatan status rapor mutu SMP		Jumlah sekolah menuju kategori minimal SNP 3	124	129
	S.2.4.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum SMP	Persentase guru yang telah mengikuti pelatihan K 13	78,50	79,02
			Pelaksanaan Ujian Nasional SMP	Ada	Ada
	S.2.4.2	Peningkatan kualitas lulusan SMP	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP	56,00	56,25
			Angka Putus Sekolah SMP	0,05	0,05
	S.2.4.3	Bangunan SMP laik guna	Sekolah pendidikan SMP bangunan kondisi baik	93,79	91,45
	S.2.4.4	Kondisi layak guna Sarana dan prasarana SMP	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	70,00	68,23
	S.2.4.5	Peningkatan prestasi akademik dan	Jumlah perolehan prestasi akedemik minimal tingkat provinsi	3	3



		non akademik siswa SMP	Jumlah perolehan prestasi non akademik minimal tingkat provinsi (dari 28 nomor lomba)	28	28
S.2.5	Perluasan Akses Pendidikan Dasar SMP		APK SMP/MTs/Paket B	106	105,81
			APM SMP/MTs/PAket B	84	91,08
S.2.5.1	Terbangunnya GSB SMP	Jumlah GSB SMPN yang dibangun	0	2	2
S.2.5.2	Terbangunnya RKB SMP	Jumlah RKB SMPN yang dibangun	10	35	36
S.2.6	Mutu tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, SD dan SMP		Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD, SD dan SMP berstandar SKM	21,30	22,72
			Persentase Meningkatnya Kepala sekolah negeri yang memiliki sertifikat kepala sekolah	88,37	90,70
S.2.6.1	Peningkatan Guru PAUD bersertifikasi	Persentase Guru PAUD bersertifikasi pendidik		11,85	12,86
S.2.6.2	Peningkatan Guru SD bersertifikasi	Persentase Guru SD bersertifikasi pendidik		22,28	23,86
S.2.6.3	Peningkatan Guru SMP bersertifikasi	Persentase Guru SMP bersertifikasi pendidik		24,92	26,82
S.2.6.4	Peningkatan mutu guru kelas SD	Jumlah Guru SD yang mengikuti pelatihan guru kelas		398	398
S.2.6.5	Peningkatan mutu guru mata pelajaran SMP	Jumlah Guru SMP yang mengikuti pelatihan keahlian di bidang yang di ampu		330	330
S.2.6.6	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah TK	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial		0	0
S.2.6.7	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah SD	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial		31	31
S.2.6.8	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah SMP	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial		19	19



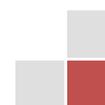
		S.2.6.9	Pembinaan Calon Kepala sekolah	Jumlah Guru yang memiliki sertifikat kepala sekolah	46	46
		S.2.64.10	Peningkatan mutu Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan keahlian	150	150
	S.2.7	Mutu pengawas sekolah		Jumlah Pengawas yang memiliki sertifikat pengawas dan penilik sekolah	100	100
		S.2.7.1	Peningkatan Pengawas dan Penilik Sekolah yang bersertifikasi	Jumlah yang mengikuti diklat calon pengawas/peningkatan Kompetensi Pengawas	34	34
	5.2.8	Publikasi dan Informasi Pendidikan Kota Batam		Tersedianya data informasi pendidikan	Ada	Ada
		5.2.8.1	Penyusunan Data dan Informasi Pendidikan Kota Batam	Tersedianya data pendidikan yang valid	Ada	Ada
S3	Penguatan tatakelola pelayanan pendidikan			Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien	100	100
	S.3.1	Ketatalaksanaan pelayanan pendidikan daerah hinterland		Jumlah sekolah hinterland yang terlayani	66	66
		S.3.1.1	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Belakang padang	Jumlah sekolah yang terlayani	20	20
		S.3.1.2	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Bulang	Jumlah sekolah yang terlayani	15	15
		S.3.1.3	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Galang	Jumlah sekolah yang terlayani	31	31
	S.3.2	Tata kelola perencanaan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan keuangan yang tepat waktu	100	100



		S.3.2.1	Peningkatan kualitas perencanaan program	Persentase dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu	100	100
		S.3.2.2	Peningkatan kualitas pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan	Persentase dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang selesai tepat waktu	100	100
		S.3.2.3	Tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase capaian pengelolaan realisasi keuangan tepat waktu sesuai dengan anggaran	100	100
				Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/ eksternal yang ditindak lanjuti	100	100
	S.3.3	Tata kelola administrasi dan kepegawaian pada kantor dinas pendidikan		Persentase pelayanan administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti	100	100
				Persentase pengelolaan kepegawaian yang terlayani	100	100
		S.3.3.1	Kenaikan pangkat dan penghargaan	Persentase kenaikan pangkat dan penghargaan aparatur	100	100
		S.3.3.2	Disiplin aparatur	Persentase kehadiran tepat waktu aparatur kantor dinas pendidikan	100	100
		S.3.3.3	Pembinaan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	50	50
		S.3.3.4	Tindak Lanjut Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindak lanjuti	100	100

Dari tabel diatas indikator Kinerja Utama (IKU) dikelompokkan untuk mengetahui berapa indikator yang termasuk dalam katagori sangat baik, baik, cukup dan katagori kurang.

- Terdapat 20 indikator dengan nilai >90% mengalami kenaikan dengan katagori **sangat baik**
- 4 (Empat) indikator tercapai dengan nilai kinerja 70 % - 89,99 %; atau dengan katagori **baik**.



- 2 (dua) indikator kinerja tercapai dengan nilai kinerja 55 % - 69,99 %; atau dengan katagori **cukup**.
- 2 (dua) indikator kinerja tercapai dengan nilai kinerja < 55 % ; atau dengan katagori **kurang**.

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan di tahun 2017 dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor **Kpts. / 419.1/DISDIK/1/2017** terdapat 6 Indikator Kinerja Utama sebagai sasaran kinerja dinas Pendidikan. Penetapan indkator kinerja tersebut merupakan sasaran program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Yang telah ditetapkan target capaiannya, sehingga akan dapat dibandingkan seberapa besar realisasi dari masing-masing indikator sasaran.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan informasi capaian target yang telah ditetapkan. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2018 sebagai berikut :

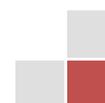
### Sasaran 1

#### Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini merupakan program strategis, sehingga di perlukan kegiatan untuk peningkatan APK PAUD. Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD untuk Tahun 2018 adalah 76 angka ini masih rendah. Sehingga perlu adanya peningkatan dan perhatian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.

Tabel 3. 2 Realisasi Sasaran Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		T	R	T	R



Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	75	77	76	77,73
---	----------	----	----	----	-------

- Angka partisipasi kasar (APK) PAUD telah melebihi target. Pada Tahun 2018 capaian APK sebesar 77,73 dengan target sebesar 76.

## Sasaran 2

### Mutu Layanan Pendidikan

Sasaran Mutu Layanan Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batam, dengan melakukan terobosan – terobosan sebagai berikut :

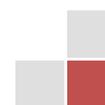
1. Penyusunan dan Pengembangan kurikulum
2. Kondisi layak guna Sarana dan prasarana
3. Ketersediaan media Penunjang Pembelajaran
4. Peningkatan kualitas lulusan
5. Mutu tenaga pendidik dan kependidikan
6. Mutu pengawas sekolah

Tabel 3.3 Realisasi Sasaran Mutu Layanan Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		T	R	T	R
Mutu Layanan Pendidikan	Persentase sekolah berakreditasi minimal B				
	PAUD	41,35	39,99	42	41,62
	SD	56	64,53	61	62,89
	SMP	67	67,36	69	69,80

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tingkat PAUD, Persentase sekolah berakreditasi minimal B belum mencapai target. Pada Tahun 2018 capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B adalah 41,62 melebihi capaian Tahun 2017 yaitu sebesar 39,99.



- Tingkat SD capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B ditahun 2018 sebesar 62,89, capaian ini melebihi target yaitu 61. Jika di bandingkan dengan capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B ditahun 2017 sebesar 64,53.
- Tingkat SMP capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B ditahun 2018 sebesar 69,80, capaian ini melebihi target yaitu 69. Jika di bandingkan dengan capaian Persentase sekolah berakreditasi minimal B ditahun 2017 sebesar 67,36.

### Sasaran 3

#### Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan

Sasaran Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Dengan melakukan terobosan – terobosan sebagai berikut :

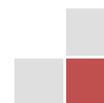
1. Ketatalaksanaan pelayanan pendidikan daerah hinterland
2. Tata kelola perencanaan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel
3. Tata kelola administrasi dan kepegawaian pada kantor dinas pendidikan

Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		T	R	T	R
Penguatan tata kelola pelayanan pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisen	100	100	100	100

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas Tata kelola pelayanan yang efektif dan efisien sangat di perlukan. Meningkatnya kualitas ini dapat di lihat dari persentase dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan pelaporan selesai dengan tepat waktu 100% baik di tahun 2017 dan tahun 2018.



**Sasaran 4****Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan**

Tabel 3.6 Realisasi Sasaran Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		T	R	T	R
Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan	Tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat	100	100	100	100

**C. REALISASI ANGGARAN**

Pengukuran atas pencapaian target dalam kegiatan yang tertuang pada masing-masing indikator kegiatan secara rinci dapat dilihat pada data tabel terlampir. Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam sampai dengan akhir tahun anggaran adalah 99.88%. Adapun kegiatan-kegiatan yang berhasil mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Dan SMPN Kec. Galang
3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Dan SMPN Kec. Bulang
4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD Dan SMPN Kec. Blk Padang
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kec. Batam Kota, Kec Nongsa
6. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kec. Sagulung, Kec. Sei Beduk
7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kec. Batu Ampar, Kec. Bengkong, Kec. Lubuk Baja
8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN Kec. Sekupang, Kec. Batu Aji
9. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK



10. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Belajar (SKB)
11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah
12. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tata Kelola Tenaga Kependidikan
13. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMP Negeri Batam (57 Sekolah)
14. Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SMPN)
15. Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)
16. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
17. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya
18. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya
19. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD
20. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Ruang Penunjang Sekolah SMP
21. Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP
22. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP
23. Pembangunan Perluasan Akses Pendidikan dasar SD (DAK) Tahun 2018
24. Pembangunan Perluasan Akses Pendidikan dasar SMP (DAK) Tahun 2018
25. Kegiatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2018 (DAK)
26. Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
27. Pembinaan Varia Pendidikan Kompetensi Akademik dan Non Akademik
28. Peningkatan Alat Media Penunjang Pembelajaran
29. Pembinaan dukungan ujian sekolah dan ujian nasional
30. Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan
31. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
32. Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
33. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi
34. Pembinaan guru dan tenaga kependidikan SMP/SMP
35. Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas sekolah
36. Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah
37. Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan



Perkembangan keadaan fisik dan keuangan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan juga dipengaruhi oleh proses dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, prosedur pelelangan yang harus dipenuhi, biaya revisi anggaran kondisi alam terutama pada paket pekerjaan konstruksi.

#### D. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja Keuangan dipengaruhi oleh jumlah anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kota Batam untuk Bidang Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Persentase realisasi keuangan untuk seluruh kegiatan baik Belanja Langsung Belanja tidak Langsung OPD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam mencapai 95,31%. Yang teralokasi tersebut dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam untuk biaya operasional seluruh kegiatan yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018.

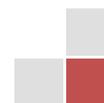
Biaya operasional kegiatan tersebut terdiri dari belanja pegawai dalam bentuk honorarium, belanja barang jasa serta belanja modal. Pagu anggaran yang dialokasikan ditetapkan pada Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 276.907.629.410,41 terealisasi sebesar Rp. 256.810.279.531.

Selain itu untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, Pemerintah juga melakukan penambahan alokasi anggaran melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS). Pembangunan bidang pendidikan diharapkan tetap terselenggara sesuai perencanaan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Batam.

Berikut disajikan tabel rincian realisasi anggaran tahun 2018.

Tabel 3.7 Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2018

NO	URAIAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Target Keuangan	277.244.198.459,61	99,92	276.907.629.410,41	99.88
2	Realisasi Keuangan	258.114.620.790,58	93,10	256.810.279.531,00	92.74



*Sumber: Laporan keuangan Dinas Pendidikan*

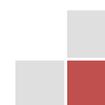
## 1. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 287.546.105.610,55 ( Perda Perubahan APBD) dan terealisasi sebesar Rp. 283.448.302.005 atau 98,57% sehingga Belanja Pegawai yang tidak terealisasi sebesar Rp. 4.097.803.605,54 atau 1,43%. Jika dibandingkan Belanja Pegawai tahun 2017 sebesar Rp. 266.034.256.830, maka pada Tahun 2018 terjadi kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp. 17.414.045.175,65 atau 6,14%.dikarenakan kenaikan status pegawai K-2 dari CPNS menjadi PNS berjumlah 353 Orang.

Jumlah anggaran dan realisasi belanja Pegawai tahun 2017 dan 2018 di Dinas Pendidikan Kota Batam disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017-2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran 2017	Jumlah Anggaran 2018
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	129.518.752.399,35	129.739.850.720,55
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok / Uang Representasi	129.518.752.399,35	101.968.863.930,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	10.039.545.545,34	10.846.565.379,90
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	239.666.875,36	223.515.000,00
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	8.611.794.905,00	9.119.038.529,45
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	1.035.961.353,35	1.080.076.500,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	6.977.794.200,35	6.419.046.378,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	199.736.328,63	80.989.933,80
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	2.181.253,52	1.755.069,40
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	148.008.525.500,00	157.806.254.890,00



5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	77.225.114.000,00	96.550.761.890,00
5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.539.000.000,00	1.728.000.000,00
5.1.1.02.007.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	63.989.899.000,00	59.527.493.000,00

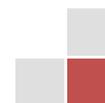
Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan

## 2. Belanja Barang Jasa

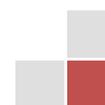
Anggaran Belanja Barang Jasa untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 204.749.582.628,47 ( Perda Perubahan APBD). Jika dibandingkan Belanja Barang Jasa tahun 2017 sebesar Rp. 210.361.535.154,63, maka pada Tahun 2018 terjadi Penurunan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 5.611.952.526,16..

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017-2018

Kode Rekening	Uraian	Realiasi 2017	Realisasi 2018
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.361.535.154,63	188.507.053.144,89
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.591.058.733,79	14.037.120.684,27
5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.598.317.071,04	8.115.616.311,27
5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	687.139.500,00	611.706.800,00
5.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	323.711.500,00	406.452.000,00
5.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.884.412.528,75	3.411.754.023,00
5.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	216.694.800,00	173.177.000,00
5.1.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	700.000,00	3.000.000,00
5.1.2.01.09.	Belanja Cinderamata	259.500.000,00	-
5.1.2.01.10.	Belanja Peralatan / Kebutuhan Rumah Tangga Pakai Habis	847.569.233,00	540.229.750,00
5.1.2.01.11.	Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis Lainnya	773.014.101,00	775.184.800,00
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.225.716.680,71	4.143.192.842,99
5.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.820.467.712,81	1.718.164.534,09



5.1.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	364.911.923,00	340.239.140,00
5.1.2.02.07.	Belanja Perlengkapan Peserta	696.540.630,00	668.673.000,00
5.1.2.02.08.	Belanja Peralatan Olahraga	972.044.414,90	874.270.103,00
5.1.2.02.11.	Belanja Bahan dan Material Lainnya	371.752.000,00	541.846.065,90
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.128.030.882,25	20.433.234.651,42
5.1.2.03.01.	Belanja telepon	783.506.706,00	403.727.960,00
5.1.2.03.02.	Belanja air	848.510.765,00	822.150.566,00
5.1.2.03.03.	Belanja listrik	2.807.181.231,00	2.713.975.025,12
5.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	331.792.425,00	332.508.200,00
5.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	782.865.502,00	1.043.756.536,70
5.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	-	-
5.1.2.03.09.	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan	217.975.000,00	86.165.000,00
5.1.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	81.967.000,00	42.432.500,00
5.1.2.03.14.	Belanja Transportasi Udara	96.293.935,00	3.713.164,00
5.1.2.03.15.	Belanja Transportasi Air	1.280.922.410,25	1.482.151.489,00
5.1.2.03.16.	Belanja Transportasi Darat	4.897.015.908,00	13.502.654.210,60
5.1.2.03.17.	Belanja Jasa Adm Bank, Pajak Bank dan Koreksi Bank	-	-
5.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.943.176.320,00	1.970.800.920,00
5.1.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.943.176.320,00	1.970.800.920,00
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	158.880.000,00	24.765.000,00
5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	158.880.000,00	6.465.000,00
5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	18.300.000,00
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.299.458.079,75	11.072.315.718,61
5.1.2.06.01.	Belanja cetak	2.396.790.360,54	1.548.063.645,00
5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.902.667.719,21	9.524.252.073,61



5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.702.053.000,00	169.400.000,00
5.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	278.400.000,00	-
5.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.414.053.000,00	144.000.000,00
5.1.2.07.06.	Belanja Sewa Lapangan Olahraga	9.600.000,00	25.400.000,00
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.288.050.000,00	2.037.788.000,00
5.1.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	44.900.000,00
5.1.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	1.187.880.000,00	1.651.688.000,00
5.1.2.08.04.	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang	100.170.000,00	2.400.000,00
5.1.2.08.05.	Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang	-	338.800.000,00
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	74.973.000,00	17.295.000,00
5.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	13.500.000,00	8.000.000,00
5.1.2.10.07.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor	4.500.000,00	500.000,00
5.1.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	56.973.000,00	8.795.000,00
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.156.910.612,00	3.291.916.726,00
5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.100.733.408,00	-
5.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	309.057.000,00	-
5.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	206.822.500,00	-
5.1.2.11.05.	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	2.235.786.704,00	3.287.816.726,00
5.1.2.11.07.	Belanja Konsumsi Lainnya	304.511.000,00	4.100.000,00
5.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	100.510.000,00	-
5.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.510.000,00	-
5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	371.819.850,00	423.983.000,00
5.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	19.150.000,00	-
5.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	86.490.000,00	122.380.000,00
5.1.2.14.08.	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	266.179.850,00	301.603.000,00

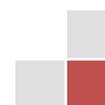


5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	952.577.476,00	399.112.386,00
5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	219.500.000,00	157.550.000,00
5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	733.077.476,00	241.562.386,00
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.892.833.529,13	4.780.551.947,00
5.1.2.18.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	36.230.000,00	-
5.1.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Taman	698.356.089,04	500.204.100,00
5.1.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel	7.700.000,00	3.850.000,00
5.1.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.109.447.986,42	946.905.000,00
5.1.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	1.000.000,00	22.000.000,00
5.1.2.18.18.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	195.250.500,00	107.477.600,00
5.1.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	1.312.400.267,78	773.922.950,00
5.1.2.18.24.	Belanja Pemeliharaan Gedung Pendidikan dan Pelatihan	3.776.187.585,89	1.036.124.400,00
5.1.2.18.25.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.451.123.100,00	1.218.340.897,00
5.1.2.18.29.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon	285.488.000,00	163.527.000,00
5.1.2.18.35.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	19.650.000,00	4.900.000,00
5.1.2.18.42.	Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Lainnya	-	3.300.000,00
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	270.128.598,00	203.371.358,00
5.1.2.19.07.	Belanja Jasa Bidang Kesehatan	10.163.598,00	5.323.358,00
5.1.2.19.11.	Belanja Jasa Event Organizer	81.600.000,00	-
5.1.2.19.16.	Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya	178.365.000,00	198.048.000,00
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	74.307.000,00	19.950.000,00
5.1.2.23.04.	Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	74.307.000,00	19.950.000,00
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	133.190.683.493,00	120.543.627.317,60
5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.099.183.493,00	20.185.997.317,60



5.1.2.26.03.	Upah Buruh/Tenaga Kerja	61.800.000,00	61.800.000,00
5.1.2.26.05.	Uang Saku Peserta	75.000.000,00	141.330.000,00
5.1.2.26.07.	Insentif Pengawas Sekolah/ Penilik Sekolah	318.000.000,00	-
5.1.2.26.08.	Insentif Guru	107.636.700.000,00	100.154.500.000,00
5.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.673.441.000,00	2.422.808.600,00
5.1.2.27.03.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat...	1.673.441.000,00	2.422.808.600,00
5.1.2.30.	Honorarium Jasa Narasumber / Tenaga Ahli	1.798.778.400,00	1.369.306.993,00
5.1.2.30.01.	Honorarium Jasa Narasumber.	149.100.000,00	12.800.000,00
5.1.2.30.02.	Honorarium Jasa Tenaga Ahli	1.649.678.400,00	1.356.506.993,00
5.1.2.31.	Belanja Pajak, Retribusi dan luran Lainnya	384.893.500,00	356.555.000,00
5.1.2.31.03.	Belanja Pajak Daerah	-	4.391.300,00
5.1.2.31.04.	Belanja Retribusi Daerah	90.916.000,00	91.320.000,00
5.1.2.31.05.	Belanja luran Lainnya	293.977.500,00	260.843.700,00
5.1.2.33.	Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD	1.083.255.000,00	789.957.000,00
5.1.2.33.01.	Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD.	1.083.255.000,00	789.957.000,00
5.1.5.		725.200.000,00	976.737.333,00
5.1.5.04.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	725.200.000,00	976.737.333,00
5.1.5.04.01.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat .....	725.200.000,00	976.737.333,00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan tahun 2018

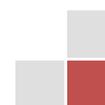


### 3. Belanja Modal

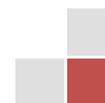
Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 tahun. Berdasarkan laporan keuangan, anggaran belanja modal tahun 2018 sebesar Rp. 65.036.135.020,33. Jika dibandingkan dengan Belanja modal tahun 2017 sebesar Rp. 46.994.947.035,95, maka terjadi kenaikan belanja modal sebesar Rp. 18.041.187.984,38.

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Modal 2018

Kode Rekening	Uraian	Realiasi 2017	Realisasi 2018
5.2.	Belanja Modal	46.994.947.035,95	65.036.135.020,33
5.2.2.03.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	29.405.000,00	-
5.2.2.03.04	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	29.405.000,00	-
5.2.2.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	-	98.800.000,00
5.2.2.06.02	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	-	98.800.000,00
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.178.971.600,00	1.159.397.975,00
5.2.2.14.01	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	1.600.000,00	-
5.2.2.14.03	Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	900.000,00	23.000.000,00
5.2.2.14.04	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	103.015.000,00	66.150.000,00
5.2.2.14.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.073.456.600,00	1.070.247.975,00
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.983.737.363,00	8.740.071.865,00
5.2.2.15.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair	4.747.721.450,00	6.754.001.450,00
5.2.2.15.03	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	12.669.000,00	21.650.000,00
5.2.2.15.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	393.060.000,00	536.506.000,00
5.2.2.15.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.820.386.913,00	1.421.774.415,00
5.2.2.15.07	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	9.900.000,00	6.140.000,00

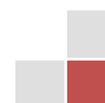


5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.268.787.000,00	2.015.221.250,00
5.2.2.16.02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	-	147.500.000,00
5.2.2.16.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.221.649.000,00	1.816.346.250,00
5.2.2.16.05	Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan	47.138.000,00	51.375.000,00
5.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	608.176.499,00	691.783.000,00
5.2.2.18.01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	418.668.499,00	400.815.000,00
5.2.2.18.07	Belanja Modal Peralatan CCTV	189.508.000,00	290.968.000,00
5.2.2.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	4.955.000,00	4.400.000,00
5.2.2.19.01	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.955.000,00	4.400.000,00
5.2.2.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	5.688.636.492,19	3.894.766.700,00
5.2.2.24.13	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	5.476.211.014,00	3.769.718.700,00
5.2.2.24.14	Belanja Alat Peraga Edukatif	212.425.478,19	125.048.000,00
5.2.2.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	145.125.000,00	-
5.2.2.35.01	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	145.125.000,00	-
5.2.3.		20.896.411.553,00	31.310.408.742,00
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.896.411.553,00	31.310.408.742,00
5.2.3.01.10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.976.739.903,00	29.332.574.892,00
5.2.3.01.31	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pagar Pengaman	-	769.714.850,00
5.2.3.01.33	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya	3.919.671.650,00	1.208.119.000,00
5.2.4.		-	213.766.000,00
5.2.4.01.	Belanja modal Pengadaan Jalan	-	213.766.000,00
5.2.4.01.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	-	213.766.000,00
5.2.5.		9.190.741.528,76	16.907.519.488,33
5.2.5.01.	Belanja modal Pengadaan Buku	8.783.312.828,76	15.711.011.087,54
5.2.5.01.01	Belanja modal Pengadaan Umum	123.025.500,00	518.820.700,00



5.2.5.01.03 .	Belanja modal Pengadaan Agama	71.589.553,00	41.232.300,00
5.2.5.01.05 .	Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa	46.799.250,00	90.489.400,00
5.2.5.01.06 .	Belanja modal Pengadaan Matematika & Pengetahuan alam	115.856.420,00	112.078.300,00
5.2.5.01.10 .	Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika	5.307.000,00	29.569.900,00
5.2.5.01.12 .	Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi	-	30.903.600,00
5.2.5.01.15 .	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	25.527.425,00	49.517.600,00
5.2.5.01.16 .	Belanja modal buku ilmu pengetahuan sosial	16.820.125,00	44.202.400,00
5.2.5.01.17 .	Belanja modal buku ilmu pengetahuan dan teknologi	1.000.000,00	34.744.800,00
5.2.5.01.18 .	Belanja modal buku ensiklopedia	31.120.000,00	1.031.131.000,00
5.2.5.01.19 .	Belanja modal buku kamus bahasa	20.855.700,00	3.400.000,00
5.2.5.01.23 .	Belanja modal buku naskah	89.211.290,00	236.240.346,00
5.2.5.01.24 .	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	8.236.200.565,76	13.488.680.741,54
5.2.5.03. .	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	39.395.000,00	827.463.900,79
5.2.5.03.01 .	Belanja modal Pengadaan Peta	39.395.000,00	827.463.900,79
5.2.5.04. .	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	368.033.700,00	369.044.500,00
5.2.5.04.12 .	Belanja Modal Peralatan Marching Band	205.770.000,00	109.600.000,00
5.2.5.04.13 .	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan Lainnya	162.263.700,00	259.444.500,00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan tahun 2018



## ***Bab 4***

### ***Penutup***

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Batam adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2018. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, dan dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, alat evaluasi kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai sasaran kinerja yang direncanakan secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja secara fisik dapat direalisasikan mendekati 100 %.

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **A. Tinjauan Umum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Batam disusun sebagai upaya untuk mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibidang Pendidikan untuk menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin handal, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap perkembangan di lingkungan masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai alat umpan balik manajemen yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas, pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di jajaran Dinas Pendidikan Kota Batam.



## B. Tinjauan Khusus

LKjIP ini telah menyajikan sebagian dari perencanaan strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dengan berbagai kendala dan hambatan serta upaya-upaya pemecahan masalah yang ditempuh.

Pencapaian kinerja suatu instansi di lingkungan pemerintahan dapat dikatakan berhasil atau gagal dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing OPD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2016-2021 terdiri dari 4 Sasaran dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU).

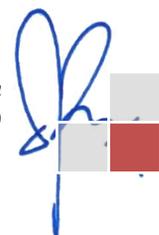
## C. Saran dan Tindak Lanjut

LKjIP di susun sebagai bahan laporan di tahun 2018 dan evaluasi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2019, agar perbaikan dilakukan secara terus menerus untuk perbaikan kualitas pelayanan pendidikan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Anggaran 2018, mudah-mudahan dapat memenuhi harapan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Batam, Januari 2019  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Batam

**HENDRI ARULAN, S.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670719 199103 1 009



## Kata Pengantar

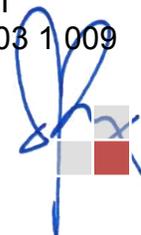
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Tahun 2018 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggung jawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Walikota Batam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Batam.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam dalam mengelola pendidikan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2016 – 2021.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kota Batam dan dapat dijadikan landasan bagi kesinambungan/kebijakan program dalam pembangunan Pendidikan Selanjutnya.

Batam, Januari 2019  
Kepala Dinas Pendidikan Kota  
Batam

**HENDRI ARULAN, S.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670719 199103 1 009



**Daftar Isi**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I     PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas pokok dan fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Visi dan Misi	8
BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Perencanaan	9
B. Rencana Strategis	10
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN	16
A. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan	18
B. Analisis Capaian Kinerja	26
C. Realisasi Anggaran	32
D. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	34
BAB IV    PENUTUP	44
A. Tinjauan Umum	44
B. Tinjauan Khusus	45
C. Saran dan Tindak Lanjut	45
LAMPIRAN	

## Daftar Tabel

Tabel 1.1. Jumlah Sekolah di Kota Batam.....	4
Tabel 1.2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Non PNS .....	5
Tabel 1.3. Tingkat Pendidikan Pejabat Eselon Dinas Pendidikan Kota Batam ....	5
Tabel 1.4. Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	6
Tabel 1.5. Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian .....	6
Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Setiap Satuan Pendidikan .....	7
Tabel 1.7. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas .....	7
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama .....	10
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan .....	11
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan .....	19
Tabel 3.2. Realisasi Sasaran Perluasan Akses Pendidikan Dasar .....	27
Tabel 3.3. Realisasi Sasaran Mutu Layanan Pendidikan .....	28
Tabel 3.4. Realisasi Sasaran Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan .....	29
Tabel 3.5. Realisasi Sasaran Kualitas Sumber daya masyarakat .....	30
Tabel 3.6. Realisasi Sasaran Peran Serta Masyarakat Terhadap Pendidikan .....	32
Tabel 3.7. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2018 .....	34
Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017-2018 .....	35
Tabel 3.9. Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2018 .....	36
Tabel 3.10. Realisasi Belanja Modal 2018 .....	41

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Laporan ini diawali dengan perumusan perencanaan strategis, penetapan indikator kinerja, pengukuran serta ditindak lanjuti dengan penyusunan LKjIP.

### **1. Perencanaan Strategis ( Renstra )**

Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Kota Batam yang ditetapkan dalam tahun 2016-2021 ini menjadi acuan dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam renstra meliputi :

- Pernyataan tentang Visi dan Misi.
- Faktor-faktor penentu keberhasilan.
- Penetapan Tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Perumusan Renstra ini merupakan jawaban atas perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting.

Sesuai Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun untuk tahun 2018 terdapat 4 sasaran, 6 Program dan 93 Kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan APBD DPA SKPD tahun 2018 yang tersedia sebesar Rp. 564.453.735.020,96.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (self assesment), dari 5 sasaran yang telah ditetapkan seluruhnya dikategori berhasil, namun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

## **2. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam**

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Kota Batam ditetapkan berdasarkan rumusan Renstra yang dijabarkan dari Visi dan Misi Dinas Pendidikan, sedangkan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2018, sehingga pengukuran kinerja secara keseluruhan dapat dilakukan secara utuh.

Evaluasi Kinerja yang digunakan disajikan pada lampiran berdasarkan formulasi indikator kinerja yang telah dirumuskan. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh adanya faktor-faktor penunjang antara lain :

Pendanaan yang memadai, tenaga yang cukup, sarana dan prasarana serta dukungan lintas dinas dan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat.

## **3. Rencana dan Realisasi Anggaran**

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2018 sebesar Rp.564.453.735.020,96 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 537.968.227.503,22 atau (95,31%). Adapun jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp. 287.546.105.610,55 dengan realisasi sebesar Rp.283.448.302.005,00 (98,57%) sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp. 276.907.629.410,41 terealisasi sebesar Rp. 256.810.279.531,00 (92,74%).